



KPK Dampingi Optimalisasi Pajak di Pemkot Yogya

YOGYA, TRIBUN - Merosotnya pendapatan dari sektor pajak daerah karena terdampak pandemi Covid-19 menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah ini kemudian menyambangi Balai Kota Yogyakarta, Selasa (8/2/22).

Kepala Satgas-Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah III KPK, Edi Suryanto, berujar, guna memetakan kesulitan yang dialami daerah, pihaknya menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maupun Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI.

"Pandemi belum berakhir, jadi kita lebih memfokuskan di aspek layanan publik. Seperti, kesehatan, perencanaan, penganggaran, perizinan dan manajemen aset yang kaitannya dengan pelayanan publik," ungkap Edi.

Walau begitu, ia tidak memungkiri, dampak akibat pandemi yang sudah menjerat sekitar dua tahun terakhir, membuat pemerintah daerah pun tidak sanggup mengoptimalkan *income*, terutama di sektor perpajakan.

Terlebih, bagi daerah-daerah seperti Kota Yogyakarta yang sangat bergantung pada industri pariwisata, baik restoran, maupun perhotelan. Otomatis, di masa pandemi, potensi pendapatan asli daerah (PAD) merosot.

"Tapi, kita melihat masih ada sejumlah pajak daerah, yang tercatat tidak terpengaruh pandemi. Realisasinya, selama atau sebelum, relatif sama," terangnya.



IST/DOK. PEMKOT YOGYA.

BERTEMU - Suasana pertemuan antara KPK dengan jajaran Pemkot Yogya di Balai Kota setempat, Selasa (8/2).

Dia menjelaskan, beberapa lini yang tak terdampak jeratan pandemi, antara lain, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), lalu pajak mineral bukan logam, pajak air permukaan, air bawah tanah.

"Kalau di provinsi pajak air permukaan, tapi kalau di kota kabupaten pajak air bawah tanah. Fokusnya pada pajak air bawah tanah. Yang jelas wujudnya merupakan pajak ya, bukan soal persentase," urainya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menegaskan siap membuka akses untuk KPK, yang hendak membantu optimalisasi pajak dari sektor-sektor yang tidak terdampak pandemi Covid-19. Satu di antaranya, pajak air bawah tanah yang sejatinya memang punya potensi.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengatakan, organisasi antirasuah melaksanakan pantauan langsung, guna melihat kondisinya di lapangan. Ia berujar, meskipun tidak terlalu besar, potensi yang dimiliki sektor pajak air bawah tanah tersebut, masih bisa dioptimalkan lagi.

"Selama ini realisasinya sekitar Rp2 miliar per tahun. Hotel dan restoran itu kan juga sudah didorong untuk memakai produksi air PDAM," ungkap Wawali.

Pemkot pun bakal memetakan kembali potensi yang bisa didapat dari sektor itu, dan skema optimalisasinya. Sebab, penggunaan sumur air dalam, yang kini marak di tengah warga masyarakat, maupun pelaku industri hotel, atau restoran, praktis menghambat realisasi perpajakan. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 30 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005